

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu ciri yang menonjol pada masa sekarang ini adalah munculnya berbagai jenis organisasi. Christian Siagian (2008) mengatakan bahwa manusia modern kini sering disebut sebagai manusia organisasional. Artinya terdapat hubungan ketergantungan antara manusia dengan organisasi. Manusia tidak mungkin mencapai berbagai tujuan hidupnya tanpa menggunakan jalur organisasional dan sebaliknya organisasi akan mencapai tujuan dan sasarannya melalui usaha kooperatif sekelompok orang yang berada di dalamnya.

Setiap organisasi memerlukan pemimpin untuk mengatur sekelompok manusia yang berada di dalamnya. Keberadaan pemimpin menjadi sangat penting mengingat dalam setiap organisasi terdiri dari sejumlah orang yang memiliki keragaman. Keragaman tersebut tidak terlepas dari hakekat manusia yang selain sebagai insan politik, insan ekonomi, dan insan sosial, juga sebagai individu dengan jati diri dan kepribadian yang khas. Peran pemimpin menjadi sangat penting dalam organisasi dimana pemimpin menjadi orang yang akan bertanggung jawab menanamkan dan menjaga kepatuhan anggota terhadap organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Al-Qur'an yang sejatinya merupakan petunjuk bagi semua umat manusia di muka bumi memiliki pembahasan mengenai konsep kepemimpinan yang menyebutkan bahwa manusia sebagai *khalifah* di muka bumi yang berarti bahwa manusia sebagai pelaksana kepemimpinan yang mana harus, memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuan.

Nabi Muhammad SAW yang secara notabene ialah pembawa risalah terakhir dan penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya bersabda yang artinya : *Pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh karena itu, pemimpin hendaklah melayani dan menolong orang lain untuk maju.* (HR. Tabrani)

Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memadukan tujuan organisasi, tujuan pemimpin, dan tujuan individu yang berada di dalam organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai apabila terdapat kerjasama diantara seluruh komponen organisasi dan kerjasama tersebut hanya mungkin terjadi jika terdapat seorang pemimpin yang dengan kualitas kepemimpinannya mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan anggota organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Pada dasarnya, pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda pula dalam menjalankan organisasinya.

Gaya kepemimpinan dan efektivitas sebuah organisasi dapat dilihat pada organisasi pemerintahan. Salah satunya adalah Pemerintah Kota. Wilayah kota Bandung [tercatat](#) memiliki 30 [kecamatan](#), 153 [kelurahan](#), 828.098 Kepala Keluarga, 2.748.733 penduduk (sensus pada data terakhir tahun 2014, didapat dari hasil sensus KTP yang berasal dari Kota Bandung). Di lain pihak jumlah penghuni Kota Bandung sendiri sudah mencapai angka lebih dari 3 juta jiwa, termasuk penduduk non-kota yang tinggal di dalam kota. Pada organisasi pemerintahan, Pemerintah Kota (PEMKOT) merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Dasar 1945](#). Pemerintah kota terdiri atas [Walikota](#) dan [Perangkat Daerah](#), yang meliputi [Sekretariat Daerah](#), [Dinas Daerah](#), [Lembaga Teknis Daerah](#), [Kecamatan](#), dan [Kelurahan](#).

Kota Bandung merupakan [kota](#) metropolitan terbesar di Tatar Pasundan, sekaligus menjadi [Ibu Kota](#) Provinsi [Jawa Barat](#). Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di [Indonesia](#) setelah [Jakarta](#) dan [Surabaya](#) menurut jumlah penduduk. Selain itu, Kota Bandung juga merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian Selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya ([Wilayah Metropolitan Bandung](#)) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah [Jabodetabek](#) dan [Gerbangkertosusila](#) ([Gerbangkertosusilo](#)).

Pada masa Pemerintahan Walikota Bandung ke-22 yang dimulai tahun 2003-2013, sebagaimana sebuah organisasi pelayanan publik, Pemerintah Kota (PEMKOT) Bandung banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak mengenai efektivitas kerja dalam organisasi dan kualitas layanan yang diberikan. Penilaian negatif dari masyarakat terhadap pegawai pemerintah di kota Bandung masih belum banyak berubah. Masyarakat menilai, pelayanan dari aparat birokrasi masih rendah. Hal demikian terlihat dari bertele-telanya penyelesaian seperti perijinan dan bentuk lainnya. Masyarakat menuntut adanya reformasi birokrasi. Birokrat yang selama ini telah mendapatkan gaji dari uang rakyat, dituntut pelayanan yang prima. Tuntutan masyarakat diberbagai aspek diantaranya peningkatan pembangunan, pelayanan pada masyarakat yang serba cepat, akurat dan prima. Salah satu permasalahan pokok setiap masyarakat ialah bagaimana para pegawai melakukan pekerjaan dengan baik.

Sering perkembangan pula, pesona kota Kembang dan *Parijs van Java* yang disematkan kepada kota Bandung seolah pudar di tengah belitan permasalahan seperti kemacetan, kerusakan infrastruktur jalan, serta banjir karena drainase yang tidak memadai. Berdasarkan hasil survei *Indonesia Research Center* (IRC), mayoritas (60,4%) warga Kota Bandung mengatakan tidak puas terhadap kinerja Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Hanya 36,3 % warga yang merasa puas dengan kinerja Dada Rosada. Sementara 2,8 % tidak tahu, dan 0,4 % tidak menjawab.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kepuasan Warga Kota Bandung terhadap Walikota Bandung periode 2003 – 2013

No.	Pernyataan	Persentase (%)
1	Tidak Puas	60,4
2	Puas	36,3
3	Tidak Tahu	2,8
4	Tidak Menjawab	0,4

Sumber : Hasil survei Indonesia Research Center (IRC) tahun 2013

Dari data tentang tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan itu, diperoleh hasil bahwa angka ketidakpuasan menduduki posisi yang tinggi, hal ini dapat dipahami dikarenakan mulai muncul harapan yang juga tinggi terhadap perubahan kondisi Kota Bandung untuk menjadi lebih baik. Menurut survei yang dilakukan pada 470 responden, berbagai masalah publik yang mendera Kota Bandung paling banyak adalah di bidang infrastruktur. Jalan rusak dan sistem drainase yang buruk paling dirasakan warga Bandung dengan persentase 24,9 %. Kondisi kerusakan infrastruktur jalan mencapai 383 kilometer dari 1.236 kilometer. Permasalahan lain yang juga dinilai buruk dan perlu penanganan adalah kemiskinan (16.6%). Selanjutnya adalah sampah (14.3%) yang harus cepat ditangani mengingat dampaknya yang berantai, terutama bagi kesehatan warga dan kebersihan lingkungan. Terakhir, adalah masalah pendidikan dan kesehatan (11.5%) serta kemacetan lalu-lintas (10.6%).

Tabel 1.2
Berbagai masalah publik di kota Bandung

No.	Macam Masalah Publik	Persentase (%)
1	Jalan rusak dan sistem drainase yang buruk	24,9
2	Kemiskinan	16,6
3	Sampah	14,3
4	Pendidikan dan Kesehatan	11,5
5	Kemacetan	10,6

Sumber : Hasil survei Indonesia Research Center (IRC) tahun 2013.

Survei yang dilakukan pada akhir Mei 2013 tersebut, mengambil sampel responden laki-laki dan perempuan sama besar. Penarikan *sampling* dilakukan secara acak bertingkat (*multistage*) dan sistematis. Jumlah responden di tiap kecamatan ditentukan secara proporsional menurut jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Secara statistik *Margin of Error* (MoE) diperkirakan sebesar 4,5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 1.3
Persentase Motivasi Staff Kantor Pemerintah Kota Bandung tahun 2012

No.	Pernyataan	Persentase Motivasi per-Pernyataan (%)	Persentase Motivasi Staff (%)
1	Kesediaan bekerja sesuai jam kerja yang berlaku	94,3	69,3
2	Kesediaan untuk berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu	81,4	
3	Kesediaan menambah jam kerja untuk mencapai target organisasi	52,9	
4	Kesediaan untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah	48,6	

Tabel 1.4
Persentase Kinerja Staff Kantor Pemerintah Kota Bandung tahun 2012

No.	Pernyataan	Persentase Kinerja per-Pernyataan (%)	Persentase Kinerja Staff (%)
1	Datang tepat waktu	85,7	78,4
2	Bekerja sesuai peraturan dan standar kerja yang berlaku di organisasi	89,7	
3	Menyelesaikan tugas tepat waktu	90,0	
4	Mampu bekerjasama dengan rekan kerja dalam menyelesaikan masalah	88,7	
5	Mengambil keputusan dalam proses penyelesaian masalah	88,0	

Tabel 1.5
Persentase Kepuasan Kerja Staff Kantor Pemerintah Kota Bandung tahun 2012

No.	Pernyataan	Persentase Kepuasan Kerja per-Pernyataan (%)	Persentase Kepuasan Kerja Staff (%)
1	Rasa nyaman dengan pola hubungan atasan dan bawahan yang terjalin	85,2	72,3
2	Hubungan kerjasama antar sesama rekan kerja sangat baik sehingga menjadi lebih semangat dalam bekerja	92,9	
3	Rasa senang bekerja di kantor Pemerintah Kota Bandung karena Walikota selalu menghargai hasil kerja saya	71,4	
4	Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri selama bekerja di kantor Pemerintah Kota Bandung	80,3	
5	Kebanggaan bekerja di kantor Pemerintah Kota Bandung	86,2	

Terkait hal-hal tersebut diatas, maka peningkatan kualitas & efektivitas kerja menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar tingkat efektivitas organisasi melaksanakan fungsinya. Organisasi dapat bertahan hidup dan berkembang apabila mampu beroperasi secara efektif. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi maka perlu adanya faktor pemimpin yang ideal. Pemimpin di organisasi merupakan faktor penting seperti upaya menciptakan lingkungan yang nyaman demi meningkatkan efektivitas organisasinya. Dalam suatu organisasi, adanya kemajuan dalam berbagai bidang, orang harus bekerjasama, mengikuti perintah-perintah yang diberikan. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa dinamika suatu organisasi sebagian besar terletak pada pundaknya yaitu dengan rencana-rencana yang pelaksanaannya didelegasikan pada bawahan.

Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D, Walikota Bandung ke-23, dalam Wawancara terkait #205BDG dan mimpi Bandung Juara pada tanggal 26 September 2015 mengatakan : “205 tahun kota Bandung, waktu yang panjang, Bandung banyak *progress*, kemajuan, tapi tantangan juga banyak. Mari kita tunjukkan kecintaan kepada Kota Bandung dengan turun tangan, bukan tunjuk-tunjuk tangan. Cintai kota Bandung dengan aksi, solusi, bukan dengan caci-maki atau anarki. *Inshaallah* dengan kekompakan dan kolaborasi mimpi kita Bandung juara, kota terbaik se-Indonesia, bisa kita capai bersama-sama. Pemerintah Kota itu merupakan potret pelayanan publik suatu daerah. Apabila di pemerintahan kota itu baik, berarti baik pula pelayanan pemerintahan di semua divisinya. Apabila di Pemerintahan Kota itu buruk, berarti buruk pula pelayanan pada umumnya. Bantu saya untuk membantu Anda, terima kasih.”

Visi Kota Bandung pada periode 2013 - 2018, yaitu pada masa pemerintahan Walikota M. Ridwan Kamil dan Wakil Walikota Oded M. Danial ialah "Bandung Kota JUARA yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera melalui Konsep BANDUNG *SMART CITY*". *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakatnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau mengantisipasi kejadian yang tak terduga. *Smart City* dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan sumber informasi & menggunakan teknologi yang canggih untuk mempermudah kehidupan.

Faktor *Smart City* :

- a. Mendorong dan mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan
- b. Bekerjasama dengan melibatkan semua pihak
- c. Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar
- d. Mempersiapkan model yang mampu menjawab tantangan dan peluang kedepan

Dimensi *Smart City* :

- a) *Smart economy* : Produktivitas tinggi, kewiraswastaan, dan kemampuan untuk transformasi
- b) *Smart mobility* : Infrastruktur ICT yang kuat dan sistem transportasi yang berkelanjutan
- c) *Smart environment* : Sumber manajemen yang berkelanjutan mencegah polusi, melindungi lingkungan
- d) *Smart people* : Keragaman, kreativitas, dan partisipasi dalam kehidupan public
- e) *Smart living* : Fasilitas budaya, kualitas tempat tinggal, kesehatan dan isu partisipasi dalam membuat keputusan
- f) *Smart governance* : Strategi dan perspektif politik, transparansi dan komunitas parrtisipasi dalam membuat keputusan. (*stateofgreen.com*)

Mengacu pada alasan diatas maka efektivitas organisasi Pemerintah Kota (PEMKOT) menjadi penting mengingat organisasi tersebut merupakan kepala dari pelayanan dan pemberdayaan masyarakat suatu daerah. Keberhasilan setiap organisasi tidak terlepas dari keberhasilan pemimpinnya. Begitupun yang terjadi dalam Pemerintah Kota. Keberhasilan setiap Pemerintahan suatu kota tidak terlepas dari keberhasilan walikotanya, yaitu bagaimana walikota dengan kualitas kepemimpinannya mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah Kepemimpinan Walikota Bandung yang berkaitan dengan efektivitas organisasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut :

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Inovatif terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung).”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya efektivitas organisasi pegawai Pemerintah Kota (PEMKOT) Bandung . Hal tersebut ditandai dengan lambannya pelayanan yang diberikan, target organisasi yang belum tercapai, tingkat motivasi, kinerja, kepuasan pegawai yang belum optimal, dan tingginya persentase ketidakpuasan responden terhadap PEMKOT Bandung. Apabila hal ini dibiarkan tentu saja dapat semakin memperkeruh kondisi PEMKOT Bandung itu sendiri.

Dalam hal ini, kurangnya efektivitas organisasi pegawai Pemerintah Kota (PEMKOT) Bandung salah satunya disebabkan oleh faktor pemimpin. Mengingat peran pemimpin yang begitu besar dalam sebuah organisasi, maka diperlukan pemimpin suatu kota yang menyadari bahwa dinamika suatu organisasi sebagian besar terletak pada pundaknya seperti melaksanakan urusan wajib seorang Walikota untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan birokrasi dan pembangunan kota demi meningkatkan efektivitas organisasinya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Gambaran persepsi pegawai Pemerintah Kota Bandung mengenai gaya kepemimpinan inovatif yang diterapkan Walikota Bandung.
2. Gambaran tingkat efektivitas organisasi pegawai PEMKOT Bandung.
3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan inovatif terhadap efektivitas organisasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Gambaran persepsi pegawai Pemerintah Kota Bandung mengenai gaya kepemimpinan inovatif yang diterapkan Walikota Bandung.
2. Gambaran tingkat efektivitas organisasi Pemerintah Kota Bandung.
3. Pengaruh gaya kepemimpinan inovatif yang diterapkan Walikota Bandung terhadap efektivitas organisasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu manajemen khususnya yang terkait dengan gaya kepemimpinan dan efektivitas organisasi juga diharapkan dapat menambah informasi / khazanah pengetahuan bagi pembaca sekaligus sebagai acuan bagi penulisan dalam bidang ilmu pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Kota Bandung hasil penelitian diharapkan mampu memberi gambaran mengenai kepemimpinan dan tingkat efektivitas organisasi di tingkatnya terutama keberhasilan dalam unsur manusia, proses, dan pencapaian tujuan.

